

IMPLIKASI KLAIM TERITORIAL TURKI DAN LIBYA MELALUI MoU DELIMITASI MARITIM DI LAUT MEDITERANIA TIMUR

Oleh: Naila Amalia Putri

Email: naila.amalia6184@student.unri.ac.id

Pembimbing: Tuah Kalti Takwa, S.H., M.H

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Klaim teritorial Turki melalui delimitasi maritim dengan negara tetangga nya dipengaruhi oleh kepentingan nasional kedua negara. Turki menilai Libya sebagai negara tetangga sekaligus negara mitra yang berpeluang untuk menghindari adanya eksklusi terhadap posisi nya di kawasan Laut Mediterania Timur. Isu maritim di kawasan membawa Turki kepada sikap asertif nya di kawasan. Tujuan penelitian ini menganalisis bagaimana implikasi dari klaim teritorial Turki dan Libya melalui MoU delimitasi maritim dengan Libya di kawasan Laut Mediterania Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui analisis dokumen yang bersumber dari beberapa buku, jurnal, artikel, dan website yang relevan dan kredibel. Penelitian ini menggunakan menggunakan Teori Interdependensi Kompleks oleh Joseph Nye dan Robert O. Keohane. Interdependensi kompleks antar aktor atau negara dalam mencapai kepentingan nasional di kawasan melalui kebijakan dan aturan yang berbeda sehingga menimbulkan eskalasi ketegangan di kawasan Laut Mediterania Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa respon penolakan terhadap MoU delimitasi maritim antar Turki dan Libya secara internasional. Beberapa implikasi klaim teritorial Turki dan Libya yang ditimbulkan terkait dengan isu sengketa maritim yang terjadi antara negara-negara yang terkait dan proyek energi yang direncanakan oleh negara-negara regional tanpa Turki dan Libya di kawasan Laut Mediterania Timur dan menimbulkan ketegangan yang masih berlangsung antar negara-negara terkait hingga saat ini.

Kata Kunci: MoU Delimitasi Maritim, Kepentingan Nasional, Laut Mediterania Timur.

ABSTRACT

Turkey's territorial claims through maritime delimitation with its neighbors are influenced by the national interests of both countries. Turkey views Libya as a neighbor and partner country that has the opportunity to avoid exclusion from its position in the Eastern Mediterranean Sea region. Maritime issues in the region have led Turkey to adopt an assertive stance in the region. The purpose of this study is to analyze the implications of Turkey and Libya's territorial claims through the MoU on maritime delimitation with Libya in the Eastern Mediterranean region.

This study uses qualitative methods, with data collection techniques through document analysis sourced from several relevant and credible books, journals, articles, and websites. This study uses the Complex Interdependence Theory by Joseph Nye and Robert O. Keohane. Complex interdependence between actors or countries in achieving national interests in the region through different policies and rules has led to escalating tensions in the Eastern Mediterranean Sea region.

The results of this study show several responses of rejection to the maritime delimitation MoU between Turkey and Libya internationally. Several implications of Turkey and Libya's territorial claims have arisen in relation to maritime disputes between the countries concerned and energy projects planned by regional countries without Turkey and Libya in the Eastern Mediterranean Sea, causing ongoing tensions between the countries concerned to this day.

Keywords: *MoU on Delimitation of the Maritime, National Interest, Eastern Mediterranean Sea.*

PENDAHULUAN

Lautan memiliki peran potensial bagi kehidupan manusia di dunia. Melalui pemanfaatan sumber Daya Alam (SDA) terbatas dan tidak terbatas yang terkandung di dalamnya. Laut juga dimanfaatkan oleh manusia sebagai jalur transportasi, lintas perdagangan atau pelayaran, pertambangan lepas pantai, pariwisata dan lain-lain.¹ Sehingga dalam hal ini laut menjadi sarana yang digunakan dalam kerjasama antar negara dalam pemanfaatan SDA namun sebaliknya SDA juga bisa memunculkan konflik antar negara-negara kawasan. Penemuan sumber daya energi yang dinilai signifikan ini justru menjadi sumber ketegangan antar negara-negara.² Fenomena dalam penguasaan laut menjadi penting untuk mencapai kepentingan nasional bagi masing-masing negara kawasan Laut Mediterania Timur. Sehingga penting bagi negara-negara kawasan untuk memperjelas batas-batas wilayah maritimnya di kawasan, seperti Turki dan Libya yang memperjelas batas zona maritimnya melalui delimitasi maritim.

Turki memanfaatkan kedekatan geografisnya dengan salah satu negara regional yang memiliki cadangan energi terbesar di Afrika yaitu Libya. Turki dan Libya memiliki hubungan yang erat pada dasarnya, walaupun hubungan antar

keduanya sempat mengalami pasang surut, namun Turki dan Libya tetap menjadikan satu sama lain sebagai sekutu dalam pembentukan aliansi seperti pada pembentukan perjanjian keamanan dan militer juga pada kesepakatan dalam penetapan zona maritim bersama.

Turki mulai menilai pentingnya potensi kawasan strategis laut sejak tahun 1990 an yang mana pada masa itu Laut Mediterania Timur menjadi kawasan sentral dimana Turki dapat meningkatkan penguasaan wilayah di kawasan tersebut dengan pengaruh regional, serta dapat mengembangkan strategi di kawasan Laut Mediterania yang sudah dimulai sejak masa pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) sejak tahun 2002.³ Dihitung sejak awal tahun 2000 an pertumbuhan ekonomi di Turki menunjukkan peningkatan pesat sehingga dalam hal ini Turki beralih dari negara yang berpenghasilan menengah ke negara yang berpenghasilan tinggi, oleh karenanya pertumbuhan ekonomi ini berdampak terhadap peningkatan konsumsi energi di negaranya dan melepaskan diri dari ketergantungan akan impor energi eksternal, hal ini mendesak Turki untuk mendiversikan kebijakan energinya.⁴ Dalam hal ini Turki kemudian meningkatkan strategi energi melalui kebijakan energi untuk pemenuhannya terhadap energi domestik dan global. Melalui

¹ Wahyu Wardhana, "Maritime Fulcrum: A Maritime History and Defense Economy Framework," *Jurnal Masyarakat & Budaya* 18, no. 3 (2016): 369–86.

² Gallia Lindenstrauss, Sarah J Feuer, and Ofir Winter, "INSS Insight No . 1238 , December 18 , 2019 The Perils of the Turkey-Libya Maritime Delimitation Deal," no. 2019 (2021).

³ Altunışık, Meliha Benli, Nathalie Tocci, and Kemal Kirişçi. "Turkey As A 'Mediterranean Power.'" Turkey: Reluctant Mediterranean Power. German Marshall Fund of the United States, 2011.

<http://www.jstor.org/stable/resrep19028.4>.

⁴ Salihe Kaya, "Erdal Tanas Karagölİsmail Kavaz, Salihe Kaya, Büşra Zeynep Özdemir National Energy and Mining Policy of Turkey," no. 35 July (2017).

strategi dan kebijakan luar negeri Turki di kawasan Laut Mediterania Timur didukung dengan konsep *Blue Homeland* atau *Mavi Vatan* yang dianut Turki menjadi bukti dari ambisi Turki dalam membentuk strategi untuk menjaga keamanan dan tanah airnya di kawasan tersebut.⁵

Turki memanfaatkan letak geografisnya yang berdekatan dengan negara-negara produsen minyak bumi dan gas alam dan juga negara-negara barat yang sangat terindustrialisasi dan juga menjadi konsumen minyak dan gas alam dengan jumlah yang besar, hal ini menjadikan Turki sebagai penghubung dalam pasokan energi melalui pemanfaatan jaringan pipa minyak dan gas internasional, yang sudah dimulai sejak tahun 2000-an seperti pada proyek pipa minyak mentah Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) tahun 2000, Interkonektor Turki-Yunani-Italia (ITGI) tahun 2004, pipa Tabriz-Ankara (Turki-Iran), proyek pipa gas alam TANAP Turki-Azerbaijan tahun 2012.⁶ MoU (*Memorandum of Understanding*) delimitasi maritim Turki-Libya ini menjadi salah satu produk dari penetapan konsep *Blue Homeland* pada batas-batas wilayah maritim yang menjadi hak kemaritiman atau kedaulatan bagi Turki sehingga memperkuat klaim dan kontrol nya atas wilayah perairannya di kawasan Laut Mediterania Timur.

Delimitasi maritim ini menetapkan batas-batas yang jelas pada zona maritim yang telah disepakati oleh kedua negara, sehingga memberikan integritas wilayah bagi masing-masing negara yang menyepakati MoU delimitasi maritim di kawasan Laut Mediterania Timur. MoU antara Turki dan Libya ini ditandatangani oleh Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Libya Fayyez Al-Sarraj pada 27 November 2019 di Istanbul.⁷ Turki dan Libya meratifikasi MoU delimitasi maritim tersebut sampai pada 5 Desember 2019 dan mulai berlaku pada 8 Desember 2019. MoU ini dinyatakan sah oleh PBB pada 30 September 2020.⁸ Turki belum bisa menyepakati batas-batas maritim dengan negara-negara tetangganya selain dengan Libya di Laut Mediterania Timur, seperti dengan Yunani, Mesir, Republik Siprus, dan Suriah disebabkan perbedaan interpretasi terkait bab delimitasi maritim yang diatur dalam UNCLOS 1982.⁹ Hal ini menjadi salah satu faktor yang berhubungan dengan situasi yang mengeksklusifkan posisinya di kawasan serta integritas wilayah maritim Turki. MoU delimitasi maritim menjadi media Turki untuk dapat meluaskan geraknya melalui kapasitas kekuatan nasionalnya dalam menjaga wilayah maritim nya bersama Libya, terlebih pada masa dimana kawasan Laut Mediterania Timur menjadi titik temuan energi yang memunculkan minat bagi negara

⁵ İlhan Uzgel, "Turkey and The Mediterranean Imbroglio," 2020. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/beirut/17494.pdf>

⁶ Ozan Karaduman, "Turkey A Potential Oil & Gas Hub," *Energy and Natural Resources*, 2015, <https://gun.av.tr/insights/articles/turkey-a-potential-oil-gas-hub#nav-mobile>.

⁷ Turkey-United Nations Treaty Collection, dari: <https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=080000028056605a&clang=en> Diakses pada: 21 Oktober 2024.

⁸ *Ibid.*

⁹ Maritime Boundaries, *Delimitation of Maritime Boundaries, The Law of the Sea*, 2013, <https://doi.org/10.18356/88124211-en>.

ataupun aktor regional dan non regional untuk dapat mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber energi tersebut. Namun hal ini justru menimbulkan ketegangan antar negara-negara regional dan negara non regional karena munculnya sengketa perbatasan wilayah maritim, seperti pada isu kesepakatan Turki-Libya melalui MoU delimitasi maritim di kawasan tersebut.

KERANGKA TEORI

Teori Interdependensi Kompleks

Penelitian ini menggunakan teori interdependensi kompleks (*Interdependence complex theory*) yang dikemukakan oleh Robert O. Keohane dan Joseph Nye. Secara umum penjelasan terkait interdependensi (ketergantungan) kompleks menurut kedua para ahli tersebut merujuk kepada keadaan dimana suatu entitas ditentukan atau dipengaruhi secara signifikan yang bersumber dari kekuatan eksternal, secara sederhana, bermakna pada ketergantungan timbal balik, interdependensi dalam politik dunia merujuk pada situasi yang ditandai oleh efek timbal balik diantara negara-negara atau antar aktor-aktor di negara yang berbeda. Di bawah ketergantungan timbal balik ini, hubungan antar negara atau aktor lainnya yang terlibat, ditandai oleh kerja sama ataupun persaingan.¹⁰

Terdapat tiga karakteristik utama dalam teori ini yaitu pertama *multiple channels* atau saluran komunikasi berganda. Dalam hal ini, pada politik internasional, negara bukan menjadi aktor tunggal, banyaknya saluran yang menjadi penghubung antar

aktor-aktor (aktor negara dan non negara) yang terkait, selain mengejar kepentingan mereka sendiri juga menjadi penghubung, membuat kebijakan pemerintah di berbagai negara lebih peka satu sama lain. Kedua, *absence of hierarchy among issues* atau tidak ada hierarki isu. Dunia yang saling berkegantungan tidak memiliki hirarki dalam isu-isu global yang terjadi. Garis pemisah antara kebijakan dalam dan luar negeri menjadi kabur, dan tidak ada agenda yang jelas dalam hubungan antar negara. ada banyak isu yang tidak disusun dalam hierarki yang jelas ataupun konsisten. Ketiga, yaitu *minor role of military force* atau peras kecil terhadap kekuatan militer. Ketika adanya interdependensi kompleks mendominasi, maka kekuatan militer memiliki signifikansi yang rendah serta kekuatan militer juga dinilai tidak relevan dalam menyelesaikan perselisihan ekonomi diantara negara anggota aliansi, dan menurut Keohane dan Nye, hubungan yang saling berpengaruh dan intens mungkin ada, namun kekuatan militer tidak lagi dianggap sebagai cara tepat untuk mencapai tujuan lain seperti kesejahteraan ekonomi dan ekologi yang semakin penting, karena sebagian besar dampak dari kekuatan militer sangat mahal dan tidak pasti.¹¹

Pada isu yang dibahas dalam penelitian ini yaitu implikasi klaim teritorial Turki dan Libya melalui MoU delimitasi maritim di kawasan Laut Mediterania Timur, Turki dan Libya memiliki tujuan yang sama dalam menjaga keamanan wilayah teritorial sekaligus kepentingan kedua

¹⁰ Waheeda Rana, "Theory of Complex Interdependence: A Comparative Analysis of Realist and Neoliberal Thoughts,"

International Journal of Business and Social Science 6, no. 2 (2015). Hlm 291.

¹¹ *Ibid.* Hlm 292

negara di kawasan tersebut. Isu regional terkait keamanan dan integritas wilayah yang kompleks di kawasan ini menunjukkan adanya ketergantungan antar kedua negara dilihat dari pembentukan kesepakatan untuk menetapkan zona maritim bersama melalui MoU delimitasi maritim dan beberapa kerja sama yang dibentuk untuk menjaga stabilitas internal dan wilayah kedaulatan kedua negara di kawasan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan dan memanfaatkan data-data yang berupa *study literature* dalam membentuk gagasan ataupun pemikiran terhadap hasil penelitian. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang digunakan oleh penulis dengan mendeskripsikan suatu objek, fenomena ataupun setting sosial yang dipaparkan melalui tulisan dengan bentuk naratif. Menuliskan kutipan data-data relevan dan sesuai dengan isu yang diteliti yang dikumpulkan berdasarkan fakta yang menjadikan variabel pendukung pada paparan penelitian.¹² berdasarkan kebutuhan data tersebut, Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik analisis dokumen yang didapatkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, organisasi, laman instansi terkait, berita online dan sumber terkait lainnya yang dipadukan untuk melengkapi kebutuhan dalam menulis

penelitian ini. Penulis juga mengumpulkan data-data resmi seperti data pada forum internasional, data dari kementerian luar negeri, dan data resmi lainnya yang relevan dengan isu yang dibahas, sehingga penulis mampu menyajikan paparan yang komprehensif pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geopolitik Turki dan Libya di Kawasan Mediterania Timur

Turki merupakan negara yang terletak pada posisi geopolitik dan budaya yang unik, hal ini bukan hanya dapat dilihat dari letak geografisnya melainkan juga budayanya sebagai penghubung antara Timur dan Barat. Turki menjadi salah satu negara peradaban Islam, Timur Tengah, dan juga Barat.¹³ Turki modern telah didirikan sejak tahun 1923 sekaligus menjadi masa kemerdekaan negara ini tepatnya pada 29 Oktober 1923 dibawah pimpinan Mustafa Kemal yang juga dikenal sebagai Ataturk atau “Bapak Turki”.¹⁴ Turki sah menjadi keanggotaan PBB sejak tahun 1945 dan NATO pada tahun 1952.¹⁵

Turki mulai aktif dalam keanggotaan dari komunitas Eropa sejak tahun 1963, dan pada tahun 1974, Turki melakukan intervensi militer di Siprus untuk mencegah penguasaan Yunani di pulau tersebut sehingga Turki menjadi negara

¹² Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).

¹³ YÜCEL BOZDAĞLIOĞLU. “Modernity, Identity and Turkey’s Foreign Policy.” *Insight Turkey* 10, no. 1 (2008): 55–75. <http://www.jstor.org/stable/26328782>.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ Central Intelligence Agency (CIA), Turkey (Turkiye). Dari: <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/turkey-turkiye/>

pelindung bagi wilayah Siprus bagian Utara yang hingga saat ini menjadi Republik Turki Siprus Utara yang hanya diakui oleh Turki. Bentuk pemerintahan negara ini adalah Republik Presidensial dan ibukotanya saat ini yakni Ankara. Saat ini Turki berada dibawah pimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan sejak 28 Agustus 2014. Presiden dipilih langsung melalui suara mayoritas mutlak rakyat dalam 2 putaran dengan masa jabatan 5 tahun.¹⁶

Negara dengan mayoritas penduduk muslim ini terletak di bagian Eropa Tenggara dan Asia Barat, di sebelah barat Turki yaitu Bosphorus yang secara geografisnya merupakan bagian dari Eropa.¹⁷ Oleh karena itu Turki menjadi negara penghubung antar dua benua besar yakni Eropa dan Asia. Posisi Turki yang berbatasan langsung dengan Laut Hitam antara Bulgaria dan Georgia, Turki juga berbatasan langsung dengan Laut Aegea dan Laut Mediterania antara Yunani dan Suriah.

Kondisi politik luar negeri Turki sendiri memiliki dua era yang menjadi penentu sikap Turki di kawasan, yakni masa modernisasi identitas Turki terhitung sejak berdirinya Republik Turki pada tahun 1923. Turki secara konsisten memilih orientasi kebijakan luar negeri yang pro-Barat, khususnya Eropa dan Amerika Serikat. Masa modernisasi Turki sudah mulai dilakukan sejak masa kemunduran Kekaisaran Ottoman, dan lebih meluas setelah kemenangan Perang Kemerdekaan yang pada saat itu Turki sudah

dibawah kepemimpinan Mustafa Kemal. Revolusi yang tidak hanya memodernisasi institusi melainkan juga merekonstruksi identitas Turki menjadi negara sekuler, nasionalis, serta Barat.¹⁸ Islam yang mulanya menjadi dasar negara Ottoman telah dihapuskan dari ruang publik, dan beralih ke sekularisme dan nasionalisme etnis.

Kebijakan luar negeri Turki telah menjadi kelanjutan dari identitas tersebut. Integrasi terhadap organisasi internasional seperti NATO, IMF, dan institusi barat dan Uni Eropa telah menjadi prioritas Turki sejak berlangsungnya modernisasi di Turki. Pada masa itu, Islam dan Timur Tengah dianggap sebagai akar dari kemunduran Turki sehingga variabel tersebut diijauhan dari diskursus terkait kebijakan luar negeri Turki. Namun pada tahun 1960-an, identitas resmi ini ditentang oleh banyak masyarakat sejak meningkatnya demokratisasi, Islamisme masuk kembali ke ranah publik dan dianggap sebagai kekuatan politik yang nyata, serta menentang adanya modernisasi ala Barat, hal ini diakui oleh pemimpin Partai Orde Nasional yaitu Necmettin Erbakan dan kemudian Partai Kesejahteraan (Welfare Party/WP).¹⁹ Sehingga terciptanya dua kubu yang saling bertentangan dan menciptakan ketegangan yang mengarah kepada konflik identitas yang menentukan arah diplomasi Turki.

Selanjutnya periode Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP). Pada puncak konfrontasi, WP dibubarkan dan dilanjutkan dengan pendirian Adalet

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Central Intelligence Agency, Turkey (Turkiye). Dari: <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/turkey-turkiye/>

¹⁸ BOZDAĞLIOĞLU. "Modernity, Identity and Turkey's Foreign Policy."

¹⁹ *Ibid.*

ve Kalkınma Partisi (AKP) atau Partai Keadilan dan Pembangunan yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan. Pada tahun 2002, AKP menang telak dalam pemilu. Meskipun berasal dari akar Islamis, AKP menunjukkan bahwa mereka adalah partai konservatif demokratis yang mendukung sekularisme dan juga integrasi dengan Eropa. Dalam hal ini AKP telah mengembangkan arah baru dalam kebijakan luar negeri yang tidak lagi bertumpu dengan Barat sebagai satu-satunya orientasi, melainkan menjadi penghubung antara Timur dan Barat. Pendekatan ini terlahir dari adanya doktrin “*Strategic Depth*” dari Ahmet Davutoglu yang memposisikan Turki sebagai kekuatan regional di antara berbagai lembah geokultural.²⁰ Hal ini bermakna terhadap penggabungan geografi dan juga budaya dalam memahami bagaimana faktor geografis dapat mempengaruhi budaya dan identitas yakni Timur Tengah, Eropa, Asia Tengah, dan juga dunia Islam.

Pada masa AKP juga terlihat bahwa Turki dengan bercita-cita untuk mewujudkan “*zero problem with neighbours*” dengan aktif dalam mencari mitra dengan negara-negara tetangga di kawasan seperti Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), Mediterania Timur, dan juga Uni Eropa.²¹ Adapun dukungan dari kelompok liberal dari lingkungan internal dan barat yakni Amerika Serikat dan Uni Eropa dari lingkungan eksternalnya, hal ini yang

membawa perubahan penting secara meluas terhadap politik luar negeri Turki. Strategi Turki dalam menyukseskan cita-citanya tersebut dengan cara menguatkan hubungan dengan beberapa negara tetangganya yakni Uni Eropa, dengan memperbaiki hubungan antara Yunani dan Republik Siprus melalui pengakuan terhadap kedaulatan Republik Siprus sesuai dengan *Annan Plan* pada 2007.²² Penguatan hubungan lainnya juga dilakukan oleh Turki melalui pendekatan ideologi Islam, politik, dan juga ekonomi dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan negara Islam lainnya.

Pada akhir tahun 2010 tepatnya pada saat fenomena *Arab Spring* yang muncul di negara-negara kawasan MENA, yang berdampak pada runtuhnya beberapa rezim diktator di negara-negara kawasan tersebut. Dalam hal ini, Turki memperkenalkan negaranya sebagai negara muslim yang demokratis melalui kerjasama dengan Organisasi Islam (OI) di kawasan Timur Tengah, Ikhwanul Muslimin.²³ Turki mengambil peran dalam intervensi dalam mengirimkan bantuan militer kepada negara-negara yang sedang berkonflik seperti Tunisia, Suriah, dan Libya.²⁴ Pada saat inilah, Turki mulai berambisi lebih dalam menjadikan negaranya menjadi pemegang pengaruh besar di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, dan kawasan Laut Mediterania Timur.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Alexander Murinson, *Turkish Foreign Policy in the Twenty-First Century* (Israel: Begin-Sadat Center for Strategic Studies, 2012).

²² İlhan Uzel, *Turkey and the Mediterranean Imbroglio* (2010).

²³ D. Günay, “*The Roles Turkey Played in the Middle East (2002–2016)*,” in *Turkish Foreign Policy: International Relations, Legality and Global Reach*, 195–215, 2017.

²⁴ Uzel, *Turkey and the Mediterranean Imbroglio*. *Op.cit.*

Pasca kudeta, pemerintah Turki membentuk doktrin keamanan baru yang mengharuskan tindakan proaktif dalam menghadapi segala bentuk ancaman keamanan baik dalam lingkup internal maupun internasional, ditambah lagi sejak 2015 sampai dengan 2020 merupakan perubahan arus perpolitikan di kawasan, terkhusus bagi Turki, mitra-mitra kawasan telah satu per satu meninggalkannya, seperti Israel dan Mesir yang mana kedua negara ini memulai pendekatan dengan Yunani dan Siprus. Hal ini menjadi menjadikan kebijakan luar negeri Turki yang dinilai tegas dan agresif di kawasan. Presiden Erdogan menekankan bahwa Turki tidak akan menunggu ancaman datang namun harus menyelesaikan sumber ancaman tersebut.²⁵ Oleh karenanya Pemerintah AKP mulai untuk aktif dalam bekerjasama dengan kelompok nasionalis domestik dalam pembuatan kebijakan luar negeri yang lebih terfokus pada isu kawasan Laut Mediterania Timur. Turki juga membentuk strategi maritim baru, dan menerbitkan konsep *Blue Homeland*.

Blue Homeland (Mavi Vatan) atau tanah air biru merupakan produk dari ambisi geostrategis yang dikembangkan oleh Turki dalam memproyeksikan pertahanan nasional terkhusus di kawasan Laut Mediterania Timur. Tanah air Turki (*Vatan*) bukan hanya merujuk kepada daratan, melainkan maknanya sudah meluas kepada *Mavi Vatan*, *Blue Homeland* atau tanah air biru yang artinya tanah air Turki adalah lautan di sekelilingnya, ungkapan ini

pertama kali diperkenalkan oleh laksamana angkatan laut yaitu Ramazan Cem Gürdeniz sejak tahun 2006 dan mulai dipopulerkan pada tahun 2019 ketika para angkatan laut latihan di Laut Mediterania Timur dan menamai latihan tersebut sebagai *Mavi Vatan*.²⁶ Konsep ini mencerminkan kebijakan maritim Turki yang lebih tegas dalam mempertahankan klaim zona maritim Turki di perairan sekelilingnya. Langkah selanjutnya yang dilakukan Turki untuk politik luar negerinya ialah dengan melakukan pendekatan militer dengan melakukan intervensi militer pada konflik internal Libya serta penandatanganan MoU Delimitasi Maritim dengan Libya di kawasan Laut Mediterania Timur.

Sedangkan Libya merupakan salah satu negara yang memiliki kondisi geopolitik berliku. Selama tahun 1970-an, Qadhafi memanfaatkan pendapatan negara melalui pemanfaatan sumber daya energi minyak bumi sekaligus mempromosikan ideologinya pada arena internasional. Walaupun kebijakan pada masa kepemimpinannya yang agresif seperti pada kebijakannya dalam mendukung kegiatan subversif (pemberontakan) dan terorisme pada masa itu, dan dijatuhi sanksi oleh PBB yaitu isolasi ekonomi dan politik, namun hal ini pada akhirnya menjadi awal mula Libya menormalisasikan hubungan terhadap negara-negara barat.²⁷ Kerusuhan yang terjadi di negara ini telah berlangsung sejak tahun 2011 akibat dari adanya kerusuhan yang terjadi

²⁵ *Ibid.*

²⁶ International Crisis Group. "The View from Ankara: Why Turkey Intervened in Libya."

Turkey Wades into Libya's Troubled Waters. International Crisis Group, 2020. <http://www.jstor.org/stable/resrep31331.5>.

²⁷ *Ibid.*

antar beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika Utara. Tepat pada masa itu perang saudara berlangsung dan aksi penggulingan kekuasaan Qadhafi di Libya terjadi.

Dinamika Isu Regional dan Klaim Teritorial Turki Melalui MoU Delimitasi Maritim dengan Libya di Laut Mediterania Timur

Sejak penemuan sumber energi di Laut Mediterania Timur, tepatnya di lepas pantai Israel dan Siprus, Turki melihat peluang pada kepentingannya di kawasan ini. Namun Turki masih dibayangi isu dengan negara tetangganya yang membuat hubungan Turki dan negara tetangganya renggang. Beberapa isu sentral di kawasan yang menciptakan ketegangan antara Turki dan negara-negara tetangganya diantaranya isu Mavi Marmara, isu Laut Aegea, dan isu Siprus.

Pada Januari 2019, Israel, Mesir, Italia, Yunani, Yordania, dan Palestina membuat konsorsium untuk mengeksplorasi minyak dan gas di Laut Mediterania Timur, namun Turki tidak termasuk didalamnya, sehingga pada Mei 2019 Turki memulai eksplorasinya secara mandiri menggunakan kapal seismik miliknya disepanjang pantai utara Siprus. Wilayah ini merupakan landas kontinental Turki yang resmi dan sah di PBB, selanjutnya perusahaan minyak nasional Turki yaitu Turkish Petroleum telah berlisensi untuk melakukan eksplorasi di kawasan tersebut.

Respon Turki dalam hal ini di refleksikan melalui kesepakatan penandatanganan MoU Delimitasi Maritim bersama Libya di kawasan. Turki, yang memiliki garis pantai Mediterania sepanjang 1.600 km, menandatangani kesepakatan dengan GNA Libya pada tanggal 27 November 2019, tentang pembatasan wilayah yurisdiksi maritim di Mediterania sesuai dengan pasal 102 Piagam PBB.²⁸

Kesepakatan Turki Libya mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 2019. Memorandum ini menetapkan yurisdiksi maritim yang menolak adanya kegiatan sepihak dan ilegal oleh negara-negara regional lain, aktor internasional, seperti perusahaan internasional diluar kawasan regional lain, hal ini ditujukan agar tidak adanya gangguan pihak lain sehingga mampu melindungi hak-hak bagi kedua negara tersebut.²⁹

Namun, terdapat beberapa implikasi dalam penentuan batas pada kesepakatan antar kedua negara tersebut. Pertama, Klaim teritorial yang telah disepakati telah menyinggung wilayah ZEE Yunani di Mediterania Timur. Berdasarkan batas-batas yang di tetapkan dalam peta tersebut Turki dan Libya telah menciptakan zona maritim antar keduanya dan memotong ZEE bagi pulau-pulau kecil Yunani di Laut Mediterania Timur yakni pulau Kreta, Karpathos, Kastellorizo, dan Rhodes. Hal ini mencerminkan posisi Turki yang telah lama menegaskan terkait

²⁸ Butler Daren, and Tuvan Gumrukcu. "Turkey signs maritime boundaries deal with Libya amid exploration row." Reuters. Dari: <https://www.reuters.com/article/%20us-turkey-libya-idUSKBN1Y213I/>

²⁹ Servet Gunerigok. "UN Registers Turkey-Libya Maritime Deal." Anadolu Agency. Dari: <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/un-registers-turkey-libya-maritime-deal/1992682#>

hak-hak maritim yang dimiliki oleh pulau-pulau kecil yang harus dibatasi dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki garis yang lebih panjang.³⁰

Seperti yang diketahui, Turki bukan merupakan negara peratifikasi UNCLOS 1982 disebabkan beberapa faktor yang telah mempengaruhi keputusan Turki untuk tidak meratifikasi UNCLOS 1982, karena adanya perbedaan interpretasi dengan negara-negara sekitar di kawasan, khususnya Yunani yang menetapkan batas dan hak kedaulatan atas zona maritim bagi pulau-pulau kecil nya yang tersebar di dekat daratan utama Turki. Pada Pasal 121 membahas terkait hak kedaulatan bagi wilayah kepulauan atas pemenuhan hak pada Zona Ekonomi Eksklusif ataupun landas kontinental, kecuali pulau yang tidak berpenghuni.³¹

Aturan ini justru mengiris hak Turki terkait klaim dan agenda maritimnya di kawasan tersebut. Turki justru merefleksikan kebijakannya dengan aturan yang berlawanan, dalam menilai hak-hak yang diakui oleh pulau kecil Yunani yang tersebar jauh dari daratan utama Yunani dan dekat dengan daratan utama Turki, tidak bisa diberikan sepenuhnya atau harus adanya pembatasan pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinental yang diakui oleh Yunani atas pulau-pulau kecil nya tersebut. Turki beragumen bahwa aturan tersebut tidak relevan jika ditetapkan

pada kawasan khusus seperti Laut Mediterania Timur.³²

Koridor maritim Turki dan Libya juga telah memutus jaringan pipa *East Mediterranean Gas Forum* (EMGF). Forum ini terdiri dari negara-negara produsen, konsumen, dan negara transit gas alam yang sejak tahun 2018 telah diperkenalkan oleh Mesir sebagai negara prakarsa dari forum gas ini, dan beranggotakan 8 negara yakni Siprus, Mesir, Yunani, Israel, Perancis, Italia, Yordania, dan Palestina. Forum ini dibentuk sebagai platform dalam dialog terkait kebijakan terstruktur mengenai gas alam, dan mengarah kepada pengembangan pasar gas regional.³³ proyek EastMed menghadapi penolakan keras dari Turki. Turki menentang proyek ini karena tidak melibatkan kepentingan Turki dan Republik Turki Siprus Utara (TRNC), yang juga mengklaim hak atas sumber daya alam di kawasan tersebut. Proyek EastMed ini mengeksklusi posisi Turki di kawasan, sehingga dalam hal ini Turki memulai untuk menetapkan zona maritimnya dengan melakukan delimitasi maritim bersama negara tetangganya yaitu Libya di kawasan dengan menyepakati kesepakatan bilateral yaitu penetapan zona maritim bersama melalui MoU delimitasi maritim. Penetapan batas maritim yang menghubungkan garis pantai kedua negara ini berpotensi menghalangi rute pipa EastMed yang sudah dibentuk sejak tahun 2018. Turki menganggap penetapan MoU ini sebagai upaya untuk memperkuat

³⁰ Mona Sukkarieh, *The East Mediterranean Gas Forum: Regional Cooperation amid Conflicting Interests*, Natural Resource Governance Institute, 2022.

³¹ Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Türkiye, *Turkish Foreign Policy on*

Maritime Boundary and Energy Issues in the Eastern Mediterranean, 2020.

³² *Ibid.*

³³ EMGF, East Mediterranean Gas Forum: <https://emgf.org/pages/about/overview.aspx>

klaim maritimnya di Laut Mediterania Timur dan menegaskan rute pengangkutan gas yang lebih ekonomis dan aman melalui Turki ke Eropa, termasuk rute Trans-Anatolia.³⁴

Perjanjian zona maritim Turki-Libya yang disepakati telah memblokir dan menghalangi jalur proyek EastMed karena ZEE yang disepakati melintasi zona laut yang akan difungsikan sebagai rute pipa EastMed. Proyek rute jaringan pipa gas EastMed yang mulanya telah banyak mengalami tantangan seperti pada biaya yang harus mempertimbangkan kedalaman laut, sehingga dapat mempengaruhi biaya dalam proses ekstraksi gas di Laut Mediterania Timur.³⁵

Tumpang tindih klaim teritorial juga terjadi akibat dari kesepakatan MoU delimitasi maritim Turki dan Libya bersama dengan klaim teritorial Yunani-Mesir yang disepakati setahun setelahnya di kawasan Laut Mediterania Timur. MoU Turki-Libya mendapat banyak tentangan dari negara-negara sekitarnya seperti salah satunya memunculkan respon aktif dari Mesir dan Yunani melalui perjanjian delimitasi maritim yang telah disepakati oleh kedua negara tersebut dan ditandatangani pada tanggal 6 Agustus 2020. Perjanjian antara Yunani dan Mesir merefleksikan tahap baru bagi hubungan bilateral kedua negara.

Langkah yang diambil oleh kedua negara ini semakin jauh mengarah kepada poros anti Turki di Timur Tengah yang dipimpin oleh Yunani, Siprus, Mesir, dan Israel, serta terdapat dukungan eksternal lainnya seperti Prancis dan Uni Emirat Arab. Persaingan yang terjadi di kawasan Laut Mediterania Timur ialah terkait dengan pembangunan dan hak dalam eksplorasi serta eksploitasi sumber daya hidrokarbon. Kepentingan Turki dan Mesir memiliki kesamaan dalam upaya untuk menjadikan negaranya sebagai pusat energi regional maupun global.³⁶

SIMPULAN

Seperti yang telah dipahami, sikap asertif Turki di kawasan yang di latarbelakangi oleh adanya sikap dari negara-negara tetangga yang mengeksklusi posisinya telah direfleksikan melalui MoU Delimitasi Maritim bersama Libya sehingga menimbulkan sengketa di kawasan tersebut. Secara prosedural, MoU antara Turki dan Libya sudah memenuhi syarat sebagai perjanjian yang valid, namun, seperti yang diketahui, suatu perjanjian terkait penentuan batas wilayah teritorial antar negara-negara di kawasan tertentu secara hukum internasional seharusnya di dasarkan pada itikad baik (*good faith*), mempertimbangkan kedaulatan negara lainnya di kawasan (*sovereignty of state*), adanya prinsip bertetangga baik (*good*

³⁴Anadolu Agency, "ANALISIS - Bara di Lautan: Permainan Besar di Mediterania untuk Kepung Turki". Dari: <https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/analisis-bara-di-lautan-permainan-besar-di-mediterrania-untuk-kepung-turki/1963192>

³⁵ Pipeline Technology Journal, "Eastmed Gas Pipeline Project Timeline Uncertain as Stakeholders Review Feasibility", 2024.

Dari: <https://www.pipeline-journal.net/news/eastmed-gas-pipeline-project-timeline-uncertain-stakeholders-review-feasibility>

³⁶ Lindenstrauss Gallia and Ofir Winter. "A Red Line for the Blue Homeland?: The Maritime Border Demarcation Agreement between Greece and Egypt." Institute for National Security Studies, 2020. <http://www.jstor.org/stable/resrep27795>.

neighborhood principle), prinsip-prinsip dalam *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC). Prinsip-prinsip ini terdiri dari saling adanya sikap saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas, teritorial dan identitas nasional.³⁷

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut menjadi aspek sengketa maritim di kawasan Laut Mediterania Timur semakin rumit dan belum mereda hingga saat ini. Dinamika isu kawasan yang rumit dan kompleks memunculkan ketegangan kembali di kawasan tersebut setelah perjanjian MoU delimitasi maritim antara Turki dan Libya disepakati. Dapat dipahami bahwa, MoU delimitasi maritim Turki dan Libya di kawasan telah melanggar beberapa prinsip hukum internasional, sehingga beberapa implikasi yang memunculkan ketegangan kembali di kawasan.

Ketegangan antar negara-negara yang terlibat dalam sengketa maritim di kawasan ini masih berlangsung hingga saat ini namun belum mengarah kepada konflik terbuka. Interdependensi kompleks antar aktor terkait baik dalam menjaga keamanan teritorial dan kepentingan nasional terkhusus pada sektor ekonomi dalam pemanfaatan energi di kawasan melalui kerja sama. Negara-negara regional dan ekstra regional menghindari kekuatan militer sebagai alat penyelesaian masalah karena adanya interdependensi kompleks antar setiap negara di kawasan Laut Mediterania Timur.

Aktor-aktor yang terlibat dalam sengketa maritim yang terjadi masih belum menemukan solusi diplomasi

dan negosiasi yang tepat dalam pemecahan masalah terhadap isu tersebut. Faktor ketegangan yang sangat kompleks ini membuat tidak adanya hierarki isu, negara atau aktor yang terlibat masih saling memiliki kepentingan satu sama lain dan hal ini juga menjadi pertimbangan bagi setiap aktor atau negara untuk berhati-hati dalam membentuk dan menetapkan kebijakan. Di sisi Turki sebagai negara yang bukan peratifikasi UNCLOS menilai bahwa sikap asertif atau tegasnya di kawasan sudah menjadi langkah tepat untuk menjaga kepentingan nasional dan keamanan zona maritimnya di kawasan.

³⁷ Y. Gunawan, V. J. Sastra, A. T. Prakosa, M. Ovitari, and L. Y. Kurniasih, "The Validity of Turkey-Libya's Agreement on Maritime

Boundaries in International Law," Jurnal Hukum dan Peradilan 9, no. 2 (2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Wardhana, W. (2016). Maritime fulcrum: A maritime history and defense economy framework. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 18(3), 369–386. <https://doi.org/10.14203/jmb.v18i3.569>
- Lindenstrauss, G., Feuer, S. J., & Winter, O. (2021). INSS Insight No. 1238: The perils of the Turkey-Libya maritime delimitation deal. *INSS Insight*, 2019.
- Altunışık, M. B., Tocci, N., & Kirişci, K. (2011). Turkey As A “Mediterranean Power.” In *Turkey: Reluctant Mediterranean Power* (pp. 5–20). *German Marshall Fund of the United States*. <http://www.jstor.org/stable/resr ep19028.4>
- Kaya, S., Karagöl, E. T., Kavaz, İ., & Özdemir, B. Z. (2017). *National energy and mining policy of Turkey*.
- Uzgel, İ. (2020). Turkey and The Mediterranean Imbroglio.
- Karaduman, Ozan. (2015). Turkey a potential oil & gas hub. *Energy and Natural Resources*. Retrieved from <https://gun.av.tr/insights/articles/turkey-a-potential-oil-gas-hub#nav-mobile>.
- Rana, W. (2015). Theory of complex interdependence: A comparative analysis of realist and neoliberal thoughts. *International journal of business and social science*, 6(2).
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Bozdağlıoğlu, Y. (2008). Modernity, identity and Turkey’s foreign policy. *Insight Turkey*, 10(1), 55–75. <http://www.jstor.org/stable/26328782>
- Murinson, A. (2012). *Turkish foreign policy in the twenty-first century*. Begin-Sadat Center for Strategic Studies.
- Günay, D. (2017). The roles Turkey played in the Middle East (2002–2016). In *Turkish foreign policy: International relations, legality and global reach* (pp. 195–215).
- International Crisis Group. (2020). The view from Ankara: Why Turkey intervened in Libya. In *Turkey wades into Libya’s troubled waters*. <http://www.jstor.org/stable/resr ep31331.5>
- Sukkarieh, M. (2022). The East Mediterranean Gas Forum: Regional cooperation amid conflicting interests. *Natural Resource Governance Institute*.
- Eastmed gas pipeline project timeline uncertain as stakeholders review feasibility. *Pipeline Technology Journal*. (2024) <https://www.pipeline-journal.net/news/eastmed-gas-pipeline-project-timeline-uncertain-stakeholders-review-feasibility>
- Lindenstrauss, G., & Winter, O. (2020). A red line for the Blue

- Homeland?: The maritime border demarcation agreement between Greece and Egypt. *Institute for National Security Studies*.
<http://www.jstor.org/stable/resrep27795>
- Gunawan, Y., Sastra, V. J., Prakosa, A. T., Ovitasari, M., & Kurniasih, L. Y. (2020). The validity of Turkey-Libya's agreement on maritime boundaries in international law. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2).
- Turkey-United Nations Treaty Collection. Dari: https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=080000028056605a&clang=_en.
- Maritime Boundaries. (2013). Delimitation of maritime boundaries, The Law of the Sea. <https://doi.org/10.18356/88124211-en>
- Central Intelligence Agency. Turkey (Turkiye). The World Factbook. Dari <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/turkey-turkiye/>
- Butler, D., & Gumrukcu, T. Turkey signs maritime boundaries deal with Libya amid exploration row. Reuters. Dari <https://www.reuters.com/article/%20us-turkey-libya-idUSKBN1Y213I/>
- Gunerigok, S. UN registers Turkey-Libya maritime deal. Anadolu Agency. Dari <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/un-registers-turkey-libya-maritime-deal/1992682#>
- Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Türkiye. (2020). Turkish foreign policy on maritime boundary and energy issues in the Eastern Mediterranean. Dari: <https://share.google/3G8ea7OL7unF7fQEe>
- East Mediterranean Gas Forum. Dari <https://emgf.org/pages/about/overview.aspx>
- Anadolu Agency. ANALISIS - Bara di lautan: Permainan besar di Mediterania untuk kepung Turki. Dari <https://www.aa.com.tr/id/berita-analisis/analisis-bara-di-lautan-permainan-besar-di-mediterania-untuk-kepung-turki/1963192>